

Polres Baubau Bekuk Pengedar Sabu dari Pria yang Ambil Paket di Belakang Warung 10 Sachet Seberat 2,59 Gram Diamankan



Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Informasi masyarakat mengantarkan Satuan Reserse Narkoba (Satrese narkoba) Polres Baubau mengungkap dugaan peredaran sabu di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Polisi mengamankan HFS alias FR (26) dan menyita 10 sachet plastik berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat brutto 2,59 gram.

Penangkapan berlangsung Jumat

(14/8/2026) sekitar pukul 22.10 Wita. Sebelum menangkap HFS, anggota Satresnarkoba yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Baubau IPTU Joni Arani, S.H., M.H., melakukan pengintaian setelah memperoleh informasi adanya pemuda yang diduga hendak mengambil atau melakukan transaksi narkoba di kawasan tersebut.

HFS, warga Kecamatan Wolio, kemudian terlihat mengambil sebuah paket yang disimpan di belakang

Lanjut ke Hal: 7

HEADLINE NEWS

BUPATI ADIOS – WALI KOTA YUSRAN PERKUAT KONEKTIVITAS PULAU BUTON, BANDARA DAN INFRASTRUKTUR JADI FOKUS UTAMA, BAUBAU DAN BUTON SELATAN SATUKAN LANGKAH

- PERKUAT KONEKTIVITAS PULAU BUTON
- BANDARA DAN INFRASTRUKTUR JADI FOKUS UTAMA
- TINGKATKAN AKSES TRANSPORTASI UDARA DAN DARAT
- DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI DI PULAU BUTON
- BAUBAU DAN BUTON SELATAN SATUKAN LANGKAH UNTUK KEMAJUAN BERSAMA

Sinergi Baubau dan Buton Selatan untuk konektivitas yang lebih kuat, infrastruktur yang lebih maju, dan masa depan yang lebih cerah.

Laporan: Ardi,
Baubau
Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Penguatan konektivitas kawasan menjadi agenda utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pemerintah Kota Baubau. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dan Wali Kota Baubau Yusran Fahim membahas keberlanjutan penerbangan, pengembangan Bandar Udara Betoambari, serta pembangunan jaringan jalan saat keduanya bertemu di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan, Rabu (19/8/2026).

Pertemuan itu menempatkan Bandar Udara Betoambari sebagai salah satu simpul penting mobilitas masyarakat Pulau Buton. Adios mendukung keberlanjutan penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing dan berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga layanan tersebut karena manfaatnya tidak hanya dirasakan warga Baubau, tetapi juga masyarakat Buton Se-

Lanjut ke Hal: 7

Keselamatan Warga Diutamakan, Pemkot Baubau Pangkas Pohon Tua di Waruruma Dengan Keraahkan Lintas Sektor



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau menyiapkan penanganan terpadu terhadap pohon tua berukuran besar yang dinilai rawan tumbang di wilayah Waruruma. Pekerjaan pemangkasan hingga penebangan akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), PLN,

Lanjut ke Hal: 7

35 Kelompok KSP PAAP Kelola Rp3,8 Miliar untuk Kemandirian Pesisir di Buton dan Buton Selatan

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Sebanyak 35 Kelompok Simpan Pinjam (KSP) Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di wilayah Buton dan Buton Selatan telah menghimpun sekitar 950 anggota dengan perputaran dana mencapai Rp3,8 miliar dalam lima tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mendorong penguatan kelembagaan tersebut agar menjadi peng-



gerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menopang upaya konservasi sumber daya

laut. Komitmen itu mengemuka dalam Temu Akbar KSP PAAP Buton dan Bu-

ton Selatan bertema “Tumbuh, Berkembang, dan Berinovasi

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Terima Penghargaan Reformasi Hukum, Raih Predikat Sangat Baik pada IRH 2026



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton dalam memperkuat tata kelola hukum daerah mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia setelah meraih predikat Sangat Baik dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, S.Sos., S.H., M.H., dalam Upacara

Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu (19/8/2026).

Predikat tersebut diberikan melalui penilaian yang dilaksanakan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Capaian itu menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi dan komitmen Pemkab Buton dalam menjalankan agenda reformasi hukum di tingkat daerah.

Bupati Alvin mengatakan penghargaan tersebut tidak sema-

ta-mata menjadi capaian administratif, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah. Penguatan regulasi dinilai penting agar setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas di bidang hukum, khususnya dalam pembentukan regulasi, penataan kebijakan, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Adios dan Wali Kota Yusran Satukan Strategi Bangun Pulau Buton, Betoambari Jadi Titik Temu Baubau-Buton Selatan Perkuat Konektivitas Kawasan

Selatan dan daerah lain di kawasan Kepulauan Buton.

“Kita harus bahu-membahu, terutama dalam membahas kepentingan masyarakat di Pulau Buton,” kata Adios. Menurut dia, keberadaan Betoambari merupakan kepentingan bersama karena Baubau dan Buton Selatan memiliki keterkaitan wilayah, mobilitas penduduk, serta aktivitas ekonomi.

Secara historis, Betoambari bukan fasilitas baru dalam menopang konektivitas kawasan. Kementerian Perhubungan mencatat lapangan terbang perintis tersebut mulai dibangun pada 1975/1976 dan diresmikan pada 22 Oktober 1976 dengan landasan awal 820 x 23 meter. Pengelolannya kemudian beralih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 1978 dan pada 1984 resmi dikenal sebagai Bandar Udara Betoambari Baubau.

Perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana infrastruktur udara secara bertahap menjadi bagian penting dari konektivitas antardaerah kepulauan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan jaringan transportasi udara juga menjadi bagian dari upaya mengatasi hambatan jarak dan geografis. Kementerian Perhubun-

gan mencatat bahwa pada awal masa kemerdekaan 1945- 1949, transportasi darat menjadi perhatian utama pemerintah karena sarana perhubungan laut dan udara belum optimal.

Kini, kebutuhan pengembangan Betoambari kembali mengemuka. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana penambahan panjang landasan sekitar 400 meter agar kapasitas pelayanan bandara dapat ditingkatkan dan peluang bagi lebih banyak jenis pesawat terbuka. Adios berharap pengembangan itu dapat memperkuat akses transportasi masyarakat Pulau Buton. “Harapan kita, bandara bisa dikembangkan sehingga pesawat-pesawat lainnya juga dapat masuk dan melayani masyarakat di wilayah Pulau Buton,” ujarnya.

Selain penerbangan, kedua kepala daerah membahas pembangunan dan penyambungan jalan selebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalyon 871 Lamaindo menuju wilayah Kota Baubau. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi akses strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus menunjang perkembangan kawasan pemerintahan Buton Selatan, termasuk menuju Kantor

Bupati Buton Selatan yang tengah dibangun.

Bagi Adios, percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena dampaknya berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. “Daerah kita harus cepat membangun infrastruktur. Infrastruktur harus menjadi perhatian agar daerah kita bisa segera mengalami perubahan dan masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.

Sinergi kedua pemerintah daerah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan konektivitas Pulau Buton tidak dapat hanya dipandang sebagai kepentingan satu wilayah administratif. Dengan Betoambari telah beroperasi sejak 1976 dan terus mengalami pengembangan, serta adanya rencana penguatan jaringan jalan, kerja sama Baubau dan Buton Selatan diarahkan untuk menjadikan transportasi dan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan kawasan. (*)

Keselamatan Warga Diutamakan, Pemkot Baubau Pangkas Pohon Tua di Waruruma Dengan Keraahkan Lintas Sektoral

aparat keamanan, serta pemerintah wilayah untuk memastikan keselamatan warga dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsina Bolu saat meninjau lokasi, Kamis (20/8), mengatakan kondisi pohon tersebut membutuhkan penanganan khusus karena ukurannya cukup besar dan berada di lingkungan yang berdekatan dengan rumah warga serta jaringan listrik. Karena itu, pemerintah tidak ingin pekerjaan dilakukan secara parsial. “Ini terlalu besar untuk ditangani masyarakat sendiri. Bahkan oleh dinas pun kalau sendiri-sendiri akan sulit,” ujarnya.

Hamsina mengatakan waktu pelaksanaan akan dipilih dengan mempertimbangkan kepadatan aktivitas masyarakat. Sabtu dan Minggu menjadi salah satu pilihan karena kegiatan perkantoran dan sekolah relatif berkurang. Namun, waktu pengerjaan tetap akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas, termasuk aktivitas warga yang berbelanja atau bepergian pada pagi hari.

Untuk mengantisipasi risiko selama pekerjaan, Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan mengatur pengalihan arus lalu lintas. PLN juga dijadwalkan melakukan pemadaman terbatas pada jaringan yang terdampak. Pemkot meminta momentum pemadaman dimanfaatkan untuk sekaligus memeriksa dan menangani pohon-pohon besar lain di sepanjang jalur tersebut yang membutuhkan pemangkasan atau penebangan.

“Dalam satu kali pemadaman ini, tebang pohon, sekaligus lihat pohon-pohon besar yang perlu ditebang atau dipangkas sepanjang jalur ini. Sehingga dalam satu kali pemadaman kita bisa menyelesaikan banyak hal,” kata Hamsina.

Penanganan tersebut melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, PLN, Dinas Perhubungan, kepolisian,

Babinsa, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta RT dan RW. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar proses penebangan berlangsung cepat, terukur, dan tidak menimbulkan risiko baru berupa jatuhnya batang atau dahan ke rumah maupun fasilitas masyarakat.

Kewaspadaan terhadap pohon rawan tumbang memiliki dasar pengalaman kebencanaan di berbagai daerah Indonesia. BNPB pada 2026 beberapa kali melaporkan pohon tumbang akibat hujan lebat dan angin kencang, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada April 2026. Dalam peristiwa tersebut, pohon tumbang menimpa tenda pengantin dan menyebabkan delapan orang luka-luka serta satu orang meninggal dunia. BNPB juga mencatat sejumlah kejadian pohon tumbang dan kerusakan akibat angin kencang di berbagai daerah sepanjang 2026, yang menunjukkan pentingnya mitigasi sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Secara internasional, pengelolaan pohon perkotaan juga dipandang sebagai bagian dari mitigasi risiko. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memasukkan manajemen risiko pohon, pemangkasan, serta pengelolaan hutan dan pepohonan perkotaan sebagai bagian dari pengelolaan ruang hijau kota yang berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi ancaman badai dan perubahan iklim.

Selain faktor teknis, Pemkot Baubau mempertimbangkan kearifan lokal sebelum pekerjaan dilakukan. Warga yang tinggal paling dekat dengan pohon menyampaikan perlunya pembacaan doa terkait kepercayaan mengenai keberadaan ‘penunggu’ di sekitar pohon. Hamsina mengatakan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat dapat dilakukan sepanjang tidak mengabaikan aspek keselamatan. “Silakan, supaya kita juga orang yang di sini tenang di hati, lahir batin siap,” tuturnya. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Terima Penghargaan Reformasi Hukum, Raih Predikat Sangat Baik pada IRH 2026

kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Alvin.

Dalam konteks nasional, agenda reformasi hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem hukum dan tata kelola pemerintahan agar regulasi lebih tertib, efektif, serta memberikan kepastian hukum. Penguatan pembentukan peraturan dan kebijakan di daerah menjadi penting karena pemerintah daerah merupakan salah satu aktor utama dalam penerapan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Secara historis, Indonesia memasuki fase penting reformasi kelembagaan dan hukum setelah perubahan politik pada 1998. Periode tersebut mendorong berbagai pembaruan dalam sistem ketatanegaraan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penguatan prinsip negara hukum. Perkembangan itu kemudian berlanjut melalui berbagai program pembenahan reg-

ulasi dan birokrasi di tingkat pusat maupun daerah.

Secara global, penguatan supremasi hukum juga menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan akses terhadap keadilan, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16. Dalam konteks tersebut, pembenahan regulasi daerah menjadi salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan dapat dipercaya.

Bagi Pemkab Buton, predikat Sangat Baik menjadi pijakan untuk mempertahankan capaian sekaligus memperbaiki kualitas pembentukan regulasi dan penataan kebijakan. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan memiliki landasan hukum kuat, selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

35 Kelompok KSP PAAP Kelola Rp3,8 Miliar untuk Kemandirian Pesisir di Buton dan Buton Selatan

si Bersama KSP PAAP” yang berlangsung di Halaman Sunset Resort Salsa, Baubau, Minggu (23/8/2026). Kegiatan yang didukung Rare Foundation sebagai mitra pendamping itu menemukan ratusan anggota dari Kadatua, Siompu, Lasalimu Selatan, Siotapina, Pasarwajo, dan Kapon-tori.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Madina Hasmar, mengatakan keberhasilan menjaga ekosistem laut harus memberi dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Karena itu, penguatan KSP PAAP diarahkan tidak hanya pada pengelolaan dana, melainkan juga peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

“Konservasi dan kesejahteraan

masyarakat harus berjalan beriringan. Kita ingin laut tetap sehat dan sumber daya ikan tetap tersedia, tetapi masyarakat pesisir juga harus mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya yang mereka jaga,” ujar Madina.

Menurut dia, KSP PAAP perlu terus dikembangkan melalui penguatan kelembagaan, pengawasan berbasis masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta kolaborasi antara pemerintah, warga, dan mitra pembangunan. Pemkab Busel juga mengusulkan agar Temu Akbar KSP PAAP berikutnya dapat dilaksanakan di Buton Selatan sebagai ruang pertukaran pengalaman dan inovasi antarkelempok.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton, Rasmin Rahman, yang membuka kegiatan tersebut, menilai pola simpan pinjam

berbasis kelompok memiliki keunggulan karena mudah dikelola dan diawasi langsung oleh para anggotanya. “Model kelompok simpan pinjam ini sederhana, sehingga pengelolaan dan pengawasannya dapat dilakukan oleh kelompok sendiri. Kesederhanaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan agar kegiatan dapat terus berjalan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menekankan, besarnya dana bukan satu-satunya penentu keberhasilan kelompok. Kepercayaan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen anggota menjadi modal sosial yang menentukan keberlanjutan KSP. Prinsip tersebut sejalan dengan sejarah gerakan koperasi modern yang berkembang sejak abad

ke-19, ketika kelompok-kelompok masyarakat membangun usaha bersama berbasis keanggotaan, demokrasi ekonomi, dan saling percaya.

Di Indonesia, semangat ekonomi kerakyatan melalui koperasi telah berkembang sejak masa pergerakan nasional dan kemudian memperoleh landasan kuat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan global, pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat juga semakin mendapat perhatian karena dipandang mampu mempertemukan kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang hidup di kawasan

pesisir.

Pendamping KSP PAAP, Wa Ode Harsida, mengatakan dana yang dikelola kelompok telah dimanfaatkan anggota untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan, hingga mendukung kegiatan di sektor perikanan. “Keberadaan KSP PAAP menunjukkan bahwa masyarakat dapat membangun kekuatan ekonomi secara bersama-sama dengan berlandaskan kepercayaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab,” ujarnya. Melalui penguatan KSP PAAP, pemerintah berharap masyarakat pesisir semakin mandiri, sementara sumber daya laut tetap terjaga bagi generasi mendatang. (*)

Gerindra dan PSI Kompak Bantah Isu Dedi Mulyadi Bakal Pindah Partai



Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menemukan pijakan politik yang jelas. Gerindra Jawa Barat menyatakan tidak melihat tanda-tanda Dedi Mulyadi meninggalkan partai, sementara PSI memastikan tidak ada komunikasi terkait rencana kepindahan tersebut.

Penegasan itu disampaikan kedua partai setelah aktivitas politik dan sosial Dedi Mulyadi di sejumlah daerah, termasuk di luar Jawa Barat, dikaitkan dengan spekulasi mengenai arah politiknya menjelang Pemilu 2029. Salah satu kegiatan yang ikut menjadi sorotan adalah kunjungan Dedi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut dilanda gempa besar pekan lalu.

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengatakan isu mengenai rencana Dedi Mulyadi bergabung dengan PSI tidak pernah dibicarakan di internal partainya. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui sumber informasi yang pertama kali mengembuskan isu tersebut.

“Kalau sebagai Ketua Bidang Politik, saya enggak mungkin enggak tahu kalau ada hal-hal begitu. Tapi ini saya enggak tahu,” kata Bestari saat dihubungi, Senin (24/8).

Bestari sekaligus membantah anggapan bahwa PSI tengah melakukan pendekatan kepada Dedi untuk kepentingan Pemilu 2029. Menurut dia, perhatian PSI saat ini masih tertuju pada proses verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, kata Bestari, isu perekrutan Dedi Mulyadi tidak menjadi bagian

dari agenda politik PSI saat ini. Ia juga menegaskan partainya belum memiliki pembicaraan mengenai skenario tersebut.

Dari sisi Gerindra, Wakil Ketua Gerindra Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna juga menyatakan belum menemukan indikasi Dedi Mulyadi akan berpindah partai. Menurut dia, Dedi masih merupakan kader Gerindra dan memiliki posisi sebagai Dewan Pembina di tingkat pusat.

“Bagaimanapun, ia adalah kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina di Gerindra Pusat. Ini menunjukkan kualitas moral dan etika yang kuat. Jadi, beberapa kali saya bertemu dengan Demul, saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Saya juga merasa aneh dengan keriuhan ini,” ujar Buky.

Buky menilai aktivitas Dedi yang sering turun ke berbagai daerah tidak tepat jika langsung ditafsirkan sebagai upaya membangun kendaraan politik baru. Ia menyebut karakter Dedi memang berbeda dari pemimpin yang lebih banyak bekerja dari balik meja.

Kunjungan Dedi ke NTT, misalnya, menurut Buky, lebih tepat dipandang sebagai kegiatan kemanusiaan. Ia menilai bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana tidak semestinya dikaitkan dengan kepentingan perpindahan partai.

“Dia aktif berkeliling dan bukan tipikal pemimpin di belakang meja. Saya melihat dia memang sosok yang seperti itu. Dia adalah sosok yang perasaannya mudah tersentuh” dia sendiri sering menyampaikan bahwa dirinya mudah tersentuh” lalu mencoba menyelesaikan masalah tersebut,”

kata Buky.

Buky menambahkan, perhatian terhadap korban bencana juga dilakukan sejumlah kepala daerah lain.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur turut memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.

Dari perspektif politik, isu kepindahan Dedi menjadi menarik karena posisinya saat ini berada di dua ranah sekaligus, yakni sebagai kepala daerah dan kader partai. Buky menegaskan Dedi sebelumnya juga telah menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia.

“Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia,” ujar Buky.

Spekulasi mengenai perpindahan kader bukan hal baru dalam politik Indonesia. Sejak era reformasi, perpindahan tokoh antarpantai menjadi bagian dari dinamika kepartaian, terutama ketika menghadapi perubahan koalisi, pemilihan kepala daerah, maupun pemilu nasional. Perubahan posisi politik elite kerap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi konfigurasi dukungan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam konteks PSI, partai tersebut didirikan pada 16 November 2014 dan pertama kali mengikuti Pemilu 2019. Pada pemilu tersebut PSI memperoleh 2.650.361 suara atau 1,89 persen suara nasional sehingga belum melewati ambang batas parlemen 4 persen. PSI kemu-

dian kembali menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 15.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa perjalanan PSI sebagai partai peserta pemilu masih relatif baru dibandingkan sejumlah partai besar yang telah berkembang sejak awal era Reformasi. Karena itu, setiap isu mengenai masuknya tokoh politik nasional atau kepala daerah ke dalam PSI berpotensi mendapat perhatian lebih besar menjelang kontestasi politik berikutnya.

Namun, hingga pernyataan yang disampaikan pada Senin (24/8), belum ada informasi mengenai komunikasi resmi antara Dedi Mulyadi dan PSI terkait kepindahan partai. PSI juga menyatakan masih berfokus pada agenda internalnya, termasuk proses verifikasi faktual KPU.

Bestari menegaskan PSI masih mempertahankan sikap politik yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Sikap tersebut, menurut dia, mengikuti arahan Joko Widodo selaku Ketua Dewan Pembina PSI.

“Kita kalau untuk Pilpres, kita kan sudah diperintah Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Ah, oke. Jadi kita tetap di situ saja sampai hari ini, enggak mikirin plan A plan B lagi, itu saja dulu,” kata Bestari.

Dengan bantahan dari kedua partai, isu mengenai kemungkinan Dedi Mulyadi meninggalkan Gerindra dan bergabung dengan PSI sejauh ini masih sebatas rumor. Belum ada pernyataan mengenai keputusan politik maupun komunikasi resmi yang menunjukkan perpindahan tersebut akan terjadi.

Perkembangan isu tersebut tetap menarik perhatian karena dinamika perpindahan tokoh politik biasanya semakin menguat menjelang pemilu. Namun, tanpa konfirmasi dari pihak yang bersangkutan maupun keputusan resmi partai, kabar mengenai kepindahan Dedi Mulyadi ke PSI belum dapat dipastikan sebagai sebuah fakta politik. (*)

DPR Kejar Pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026

JAKARTA, BP- Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat disahkan dalam rapat paripurna paling lambat Desember 2026. Target tersebut dikejar setelah rangkaian penyerapan aspirasi masyarakat dan penyusunan substansi regulasi terus dilakukan sepanjang tahun ini.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman mengatakan waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan pembahasan tinggal sekitar delapan pekan apabila masa reses DPR diperhitungkan. Karena itu, seluruh tahapan legislasi akan disusun secara intensif agar tenggat pengesahan tidak kembali bergeser.

“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026,” kata Habiburrokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Dalam delapan pekan masa sidang tersebut, Komisi III akan melanjutkan sejumlah agenda. Prosesnya mencakup rapat dengar pendapat umum (RDPU), harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), pengesahan pembahasan tingkat pertama, hingga pengambilan keputusan tingkat kedua dalam rapat paripurna.

Komisi III sebelumnya telah melakukan penyerapan aspirasi dalam jumlah cukup besar. Hingga 25 Agustus 2026, tercatat 35 kali RDPU telah digelar, tiga kali kunjungan kerja dilakukan ke daerah, serta masukan tertulis diterima dari puluhan elemen masyarakat.

Habiburrokhman mengatakan pola penyerapan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan publik terhadap rancangan regulasi yang mengatur mekanisme perampasan dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Meski demikian, pembahasan RUU tersebut tidak hanya menyangkut percepatan pengesahan. DPR masih perlu memastikan sejumlah norma tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Isu seperti perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), pembuktian terbalik, perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah, serta pengelolaan aset hasil perampasan menjadi bagian yang mendapat perhatian.

Komisi III juga menaruh perhatian pada standar pembuktian. Mekanisme yang nantinya diterapkan harus mencegah negara mengambil alih aset seseorang hanya berdasarkan dugaan. Karena itu, diperlukan batasan dan standar bukti yang jelas sebelum kewajiban menjelaskan asal-usul aset dibebankan kepada pemilik atau pihak yang menguasainya.

Bagi masyarakat yang masih ingin memberikan masukan, DPR masih membuka ruang penyampaian aspirasi. Namun, Habiburrokhman meminta masukan yang belum disampaikan dalam forum resmi dapat dituangkan dalam konsep tertulis mengingat waktu pembahasan yang semakin terbatas.

“Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis,” ujar Habiburrokhman.

Ia menilai proses penyerapan aspirasi yang telah berlangsung sudah mendekati tahap maksimal. Menurut dia, peta pendapat masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset telah terbentuk, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai sejumlah norma yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang.

Secara politik legislasi, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh posisi penting setelah resmi masuk Pro-

legnas Prioritas 2025-2026 melalui keputusan rapat paripurna DPR pada September 2025. RUU tersebut ditetapkan sebagai salah satu dari 52 RUU dalam daftar prioritas hasil perubahan Prolegnas.

Perjalanan RUU tersebut sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum masuk kembali ke Prolegnas. Pada 2009, PPATK telah menginisiasi dan menyampaikan rancangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dibahas. Draf pertama kemudian selesai disusun pada 2012, tetapi tidak berlanjut menjadi undang-undang hingga berakhirnya pemerintahan SBY.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, RUU Perampasan Aset sempat masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015. Draf kedua selesai pada 2019 dan pemerintah mengusulkan agar RUU tersebut masuk Prolegnas 2020. Namun, pembahasan kembali tidak berjalan. Pada Mei 2023, Presiden Joko Widodo bahkan telah mengirim surat presiden kepada DPR agar RUU tersebut segera dibahas, tetapi pembahasan belum berlanjut hingga akhir masa pemerintahannya pada Oktober 2024.

Perjalanan panjang itu membuat target Desember 2026 memiliki arti penting dalam agenda penguatan hukum pemberantasan korupsi. Pada Juli 2026, DPR juga menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan tidak dikeluarkan dari daftar tersebut. Komisi III ketika itu disebut terus menyusun rancangan dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi.

Kebutuhan penguatan mekanisme pemulihan aset juga memiliki konteks internasional. Indonesia telah mengesahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 18 April 2006 dan menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana.

Dalam perkembangan hukum internasional, pemulihan aset memang menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi lintas negara. Pendekatan tersebut berangkat dari gagasan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus berupaya mengembalikan hasil kejahatan kepada negara atau pihak yang berhak.

Di tingkat nasional, arah tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya RUU Perampasan Aset. Namun, efektivitas aturan akan sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan negara mengejar aset hasil kejahatan dan perlindungan hak warga negara atas kepemilikan yang sah.

Habiburrokhman menyatakan sebagian besar masyarakat yang ditemui dalam proses penjangkaran aspirasi mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Pada saat yang sama, ia mengatakan dukungan tersebut berjalan bersama harapan agar aturan disusun secara hati-hati dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.

Dengan sisa waktu sekitar delapan pekan masa sidang, Komisi III kini menghadapi tahap penentuan. DPR dan pemerintah harus menyelesaikan substansi, menyepakati DIM, menuntaskan pembahasan tingkat pertama, dan membawa RUU tersebut ke rapat paripurna. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, RUU Perampasan Aset ditargetkan menjadi undang-undang pada Desember 2026. (*)

Pemprov Sultra Bebaskan Lahan untuk Tanggul Pengendali Banjir Kendari, Puluhan Warga Setuju



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai membuka jalan bagi pembangunan tanggul pengendali banjir di Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo, Kota Kendari. Sekitar 30 kepala rumah tangga terdampak telah menyatakan persetujuan terhadap proses pembebasan lahan yang menjadi bagian awal proyek tersebut.

Persetujuan itu disampaikan dalam sosialisasi pembebasan lahan yang digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra di Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari, Jumat (21/8/2026). Proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan permukiman warga dari ancaman banjir yang kerap muncul ketika musim hujan.

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman hadir dalam sosialisasi bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra Martin Effendi Patulak serta Camat Baruga Bustan. Kehadiran pemerintah daerah menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan tahapan pembebasan lahan dapat berjalan bersama masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sultra akan menanggung seluruh biaya pembebasan lahan. Adapun pekerjaan

konstruksi tanggul nantinya dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari setelah tahapan persiapan dan pengadaan lahan terpenuhi.

“Pembebasan lahan menjadi tahapan penting agar pembangunan tanggul dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan teknis dan ketentuan yang berlaku,” demikian garis besar komitmen pemerintah dalam sosialisasi tersebut.

Untuk menentukan nilai lahan yang dibebaskan, pemerintah tidak menetapkan harga secara sepihak. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan melakukan pengukuran sekaligus penilaian terhadap lahan masyarakat yang terdampak proyek.

Pemerintah Kota Kendari bersama KJPP juga akan memeriksa status kepemilikan setiap bidang tanah. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar proses pemberian nilai ganti rugi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi teknis, tanggul direncanakan dibangun dengan jarak sekitar empat meter dari tepi sungai. Posisi tersebut akan menjadi bagian dari rancangan pengamanan sungai untuk mengurangi kemungkinan air meluap ke kawasan permukiman ketika debit meningkat.

“Sekitar 30 kepala rumah tangga yang terdampak sudah menyatakan persetujuan terhadap proses

pembebasan lahan,” ujar pihak pemerintah dalam sosialisasi. Persetujuan masyarakat menjadi modal awal untuk melanjutkan tahapan pengukuran, verifikasi kepemilikan, dan penilaian lahan.

Kebutuhan pengendalian banjir melalui infrastruktur sungai bukan persoalan baru di Indonesia. BNPB mencatat banjir termasuk bencana yang paling dominan dalam rangkaian bencana hidrometeorologi. Pada Januari hingga Agustus 2020, misalnya, tercatat 726 kejadian banjir yang menyebabkan lebih dari 2,8 juta orang mengungsi.

Pengalaman Jakarta juga memperlihatkan bahwa ancaman banjir dapat berulang dalam rentang sejarah yang panjang. BNPB mencatat curah hujan ekstrem di sejumlah titik Jakarta pada 1 Januari 2020, antara lain 377 milimeter di Halim, 335 milimeter di Taman Mini, dan 259 milimeter di Jati-asih. Catatan tersebut menunjukkan pentingnya kombinasi antara pengelolaan daerah aliran sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Dalam konteks yang lebih luas, pengendalian banjir juga menjadi persoalan lintas negara. Belanda, misalnya, memiliki sejarah panjang menghadapi banjir karena kondisi geografisnya yang membuat sebagian wilayah berada di bawah permukaan laut. BNPB mencatat pengelolaan air dan

sistem perlindungan banjir menjadi bagian penting dari pengalaman negara tersebut dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi.

Karena itu, rencana pembangunan tanggul Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo tidak sekadar dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terhadap warga. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan proses pembebasan lahan dapat berlangsung tertib sehingga pembangunan yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari dapat segera direalisasikan.

“Pembangunan tanggul diharapkan menjadi solusi nyata untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman banjir,” kata pemerintah.

Dengan skema tersebut, pemerintah membagi tahapan pekerjaan secara jelas: Pemprov Sultra bertanggung jawab atas pembebasan lahan, KJPP melakukan pengukuran dan penilaian, Pemkot Kendari membantu analisis status kepemilikan, sedangkan pembangunan tanggul ditanngani Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari. Langkah ini diharapkan memperkuat upaya pengurangan risiko banjir di kawasan Wanggu dan Lepo-Lepo secara berkelanjutan. (*)

Inflasi Sultra 3,43 Persen, GPM Sultra Tembus 218 Kali, Intervensi Harga Pangan Diperluas ke Kepulauan



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen menjaga keterjangkauan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Hingga 24 Agustus 2026, program tersebut telah dilaksanakan 218 kali dan diarahkan menjangkau masyarakat di wilayah pelosok serta kepulauan.

Kebijakan itu dilakukan di tengah inflasi Sulawesi Tenggara yang pada Juli 2026 masih mencapai 3,43 persen secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik Sultra juga menunjukkan terjadi deflasi bulanan sebesar 0,19 persen pada periode yang sama.

GPM digelar Dinas Ketahanan Pangan Sultra di Pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Senin (24/8/2026), bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menemukan masyarakat dengan produsen dan distributor pangan sehingga sejumlah komoditas dapat dijual di bawah harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Aris Sismananto, mengatakan pemangkas rantai distribusi menjadi salah satu kunci agar harga yang diterima masyarakat lebih terjangkau. “Dengan Gerakan Pangan Murah ini mata rantai itu kita pangkas sehingga masyarakat kita bisa menikmati harga dari distributor,” ujar Aris.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Beras premium 10 kilogram dijual Rp155.000, beras SPHP 5 kilo-

gram Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp20.000, minyak Bimoli 2 liter Rp46.000, minyak Filma 2 liter Rp45.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, telur ayam Rp48.000, bawang merah 1 kilogram Rp30.000, dan bawang putih Rp40.000.

Menurut Aris, stabilisasi harga pangan tidak cukup dilakukan di pusat perkotaan. Kondisi geografis Sultra yang memiliki banyak wilayah kepulauan membuat biaya dan jalur distribusi menjadi persoalan tersendiri. Karena itu, pemerintah akan memperbanyak GPM agar masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses pangan dengan harga yang relatif setara dengan masyarakat di Kota Kendari.

“Bapak Gubernur terus akan memasifkan Gerakan Pangan Murah ini sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari,” katanya.

Program tersebut menjadi bagian dari langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra. Aris mengatakan inflasi sejak Januari hingga Juli 2026 menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan kontribusi terhadap inflasi. “Gerakan Pangan Murah ini akan masih kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Secara nasional, GPM telah berkembang menjadi salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Badan Pangan Nasional mencatat GPM pada 2022 telah dilaksanakan 442 kali di 30 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Jumlahnya meningkat menjadi 1.626 kali

pada 2023, lalu melonjak menjadi 9.547 kali pada 2024 yang tersebar di 480 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Perkembangan tersebut berlangsung seiring kebutuhan pemerintah menjaga inflasi setelah tekanan harga pangan global meningkat tajam. FAO mencatat indeks harga pangan dunia mencapai rekor pada Maret 2022. Pada Juni 2026, indeks tersebut berada 19 persen di bawah rekor Maret 2022, tetapi harga komoditas pangan internasional masih bergerak dinamis.

Pengalaman nasional menunjukkan intervensi harga dan pasokan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Badan Pangan Nasional menyebut inflasi Indonesia pada 2024 sebesar 1,54 persen, terendah dan relatif stabil sejak penghitungan inflasi dimulai pada 1958. Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi 2022 sebesar 5,51 persen dan 2023 sebesar 2,61 persen.

Selain menekan harga, Pemprov Sultra mendorong diversifikasi konsumsi melalui penguatan pangan lokal. Aris mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka serta Gerakan Muna Makan Jagung di Kabupaten Muna sebagai model pengembangan sumber pangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu.

Pemerintah berharap GPM tidak hanya menjadi pasar murah sesaat, tetapi berkembang sebagai kebijakan yang memperkuat rantai pasok pangan dan daya beli masyarakat. Masyarakat pun diminta berbelanja secara tertib dan memanfaatkan pangan murah sesuai kebutuhan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak warga. (*)

Wakoko Cup I U-35 Digelar di Buton, Semangat Sepak Bola Lintas Usia Menguat



Pewarta: La Harman

BUTON, BP-Kompetisi sepak bola usia 35 tahun ke atas, Wakoko Cup I U-35+, resmi bergulir di Kabupaten Buton. Turnamen yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Wakoko, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Minggu (23/8/2026), tersebut menjadi ruang bagi para pemain senior untuk kembali berkompetisi sekaligus mempererat hubungan sosial melalui olahraga.

Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, S.T., yang mewakili Bupati Buton. Prosesi tersebut turut dihadiri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton Sabaruddin Paena serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Antusiasme masyarakat terlihat dalam pembukaan kompetisi. Kehadiran peserta dan warga di sekitar lapangan menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya dipandang sebagai pertandingan, tetapi juga sebagai aktivitas yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana kebersamaan.

Wakoko Cup I secara khusus memberikan kesempatan kepada pesepak bola berusia 35 tahun ke atas untuk tetap aktif di lapangan. Batas usia tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aktivitas olahraga masyarakat tidak berhenti ketika seseorang melewati usia produk-

tif sebagai atlet kompetitif.

Dalam konteks pembangunan olahraga daerah, keberadaan kompetisi semacam itu memiliki arti penting. Selain menjaga kebugaran, pertandingan antarpemain senior dapat menjadi sarana memperkuat jejaring sosial, membangun komunikasi antarkelompok, dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat.

Syarifudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut menginisiasi dan mendukung penyelenggaraan Wakoko Cup I. Menurut dia, terselenggaranya turnamen tersebut merupakan hasil kerja bersama antara panitia, KONI, pemerintah kelurahan, peserta, serta masyarakat.

"Turnamen ini hendaknya tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, sportivitas, dan semangat hidup sehat," kata Syarifudin dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Ia berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi sebagai momentum untuk menjaga persaudaraan. Persaingan di lapangan, kata dia, semestinya tetap ditempatkan dalam koridor sportivitas sehingga tidak menghilangkan tujuan utama kegiatan sebagai wadah silaturahmi.

Dukungan terhadap turnamen juga disampaikan Ketua KONI Kabupaten Buton Sabaruddin Paena. Ia menilai kegiatan olahraga yang digerakkan

masyarakat perlu terus dikembangkan karena dapat memperluas partisipasi warga dalam aktivitas olahraga, tidak terbatas pada kelompok atlet usia muda.

"Kegiatan seperti ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dan budaya olahraga di Kabupaten Buton," ujar Sabaruddin.

Wakoko Cup I U-35+ sekaligus memperlihatkan bahwa sepak bola memiliki daya tahan sosial yang kuat. Olahraga ini dapat dimainkan dan dinikmati lintas generasi, dari kelompok usia anak-anak hingga pemain senior, dengan bentuk kompetisi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta.

Secara historis, sepak bola telah berkembang menjadi salah satu olahraga paling populer di dunia sejak berdirinya F  d  ration Internationale de Football Association (FIFA) pada 1904. Kompetisi internasional kemudian berkembang hingga penyelenggaraan Piala Dunia FIFA pertama di Uruguay pada 1930. Perkembangan tersebut turut memperkuat posisi sepak bola sebagai olahraga yang tidak sekadar berorientasi pada prestasi, tetapi juga membangun identitas dan hubungan sosial.

Di Indonesia, perjalanan sepak bola juga memiliki sejarah panjang. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berdiri pada 19 April 1930 di Yo-

ogyakarta. Sejak itu, sepak bola berkembang dari kompetisi lokal hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan olahraga masyarakat. Tradisi tersebut terus berlanjut melalui berbagai turnamen, termasuk kompetisi berbasis komunitas dan kelompok usia.

Dalam konteks lokal, Wakoko Cup I U-35+ melanjutkan tradisi tersebut dalam skala masyarakat. Kompetisi tidak hanya memberikan ruang bagi pemain untuk mempertahankan aktivitas fisik, tetapi juga mempertemukan warga dalam sebuah agenda bersama yang berlangsung di lingkungan mereka sendiri.

Seluruh rangkaian pertandingan diharapkan dapat berlangsung aman dan lancar dengan tetap mengedepankan aturan permainan serta sportivitas. Kehadiran turnamen ini juga diharapkan dapat berkembang menjadi agenda olahraga masyarakat yang berkelanjutan dan memperkuat persaudaraan di Kabupaten Buton.

Dengan dimulainya Wakoko Cup I, lapangan sepak bola tidak sekadar menjadi tempat bertanding. Lapangan tersebut menjadi ruang interaksi sosial, tempat pengalaman para pemain senior kembali dipertemukan, sekaligus sarana untuk menegaskan bahwa semangat berolahraga dapat tetap hidup tanpa dibatasi usia. (*)

Taklukkan Boneoge A 3-1, Lakudo FC
Kampium Turnamen HUT ke-81 RI, Bupati Azhari Dorong Tangkalawa Dibenahi



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH- Lakudo FC keluar sebagai juara turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia setelah menundukkan Boneoge A dengan skor 3-1 pada partai final di Lapangan Tangkalawa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sabtu sore (22/8/2026). Ribuan suporter menyaksikan laga penentuan tersebut.

Kemenangan itu sekaligus menjadi penutup rangkaian kompetisi sepak bola yang digelar untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Bagi pemerintah daerah, turnamen tidak hanya menjadi agenda hiburan masyarakat, tetapi juga ruang untuk mengembangkan potensi olahraga dan mempertemukan talenta sepak bola dari berbagai wilayah.

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, yang hadir dalam pertandingan tersebut kemudian menutup turnamen secara resmi. Ia menilai keberlangsungan kompetisi olahraga di tingkat kecamatan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas fasilitas agar pembinaan atlet dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Perhatian pemerintah daerah terutama diarahkan kepada Lapangan Tangkalawa. Azhari menyatakan fasilitas tersebut akan diupayakan untuk dibenahi sehingga lebih tertata, nyaman, dan dapat digunakan untuk pertandingan dengan cakupan lebih luas di tingkat kabupaten.

"Infrastruktur akan terus kami upayakan perbaikannya, selagi itu demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat banyak," kata Azhari.

Menurut dia, keberadaan sarana olahraga yang memadai memiliki hubungan langsung dengan upaya meningkatkan prestasi atlet. Lapangan yang layak tidak hanya diperlukan ketika turnamen berlangsung, tetapi juga menjadi tempat latihan dan pengembangan kemampuan pemain secara rutin.

Dorongan tersebut mendapat konteks tambahan dari capaian sepak bola Buton Tengah di luar daerah. Sebelumnya, tim sepak bola asal Buton Tengah berhasil meraih juara dalam turnamen yang digelar di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Prestasi itu menjadi salah satu modal untuk terus memperkuat pembinaan sepak bola daerah.

Dalam sejarah olahraga Indonesia, sepak bola memang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan olahraga nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berdiri pada 19 April 1930 di Yogyakarta, ketika olahraga tersebut berkembang sebagai bagian dari gerakan kebangsaan dan pembentukan identitas Indonesia.

Secara global, sepak bola kemudian berkembang menjadi olahraga

dengan jangkauan yang sangat luas. Piala Dunia FIFA pertama digelar di Uruguay pada 1930 dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan kompetisi sepak bola internasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi di tingkat lokal sekalipun dapat menjadi bagian dari ekosistem pembinaan olahraga yang lebih besar.

Dalam konteks daerah, kompetisi seperti turnamen HUT Kemerdekaan mempunyai fungsi yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain menjadi sarana rekreasi, pertandingan dapat membuka ruang bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding, menguji kemampuan, serta membangun mental kompetitif.

Pada penutupan turnamen itu, Bupati Azhari juga menerima dua Surat Keterangan Hibah Tanah untuk Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Salah satu hibah berasal dari Zaali berupa lahan seluas 10.900 meter persegi atau 1,09 hektare yang berlokasi di Kelurahan Lakudo.

Azhari mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui penyerahan aset tersebut. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

"Dukungan masyarakat seperti ini merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah," ujar Azhari.

Penutupan turnamen juga dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Buton Tengah Abdullah, anggota DPRD Syarifuddin Reno, Kapolsek Lakudo, Sekretaris Kecamatan Lakudo, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Kehadiran unsur pemerintah dan masyarakat menunjukkan tingginya perhatian terhadap kegiatan olahraga di tingkat lokal.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan tertib hingga pertandingan berakhir. Setelah peluit panjang, Lakudo FC menerima piala sebagai tanda keberhasilan mereka menjadi kampiun, disusul foto bersama antara pemain, pemerintah daerah, panitia, dan sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan turnamen.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, berakhirnya turnamen bukan berarti perhatian terhadap sepak bola ikut berhenti. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas olahraga, terutama Lapangan Tangkalawa, dapat dibenahi secara bertahap sehingga mampu menunjang aktivitas olahraga masyarakat sekaligus menjadi tempat yang representatif untuk pertandingan sepak bola tingkat kabupaten. (*)

Baubau Perkuat Deteksi Laboratorium untuk Pertahankan Eliminasi Malaria



Peliput: Andina L

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memperkuat kapasitas tenaga laboratorium sebagai bagian dari strategi mempertahankan status eliminasi malaria di daerah tersebut. Langkah ini dinilai penting karena status bebas malaria tidak berarti risiko penularan telah sepenuhnya hilang, sementara kasus malaria secara nasional justru meningkat dari 543.965 kasus pada 2024 menjadi 706.297 kasus pada 2025 atau sekitar 30 persen.

Penguatan tersebut dilakukan Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang bekerja sama dengan Bapelkes Sultra. Kegiatan berlangsung selama tujuh hari, 24-30 Agustus 2026, di Hotel Mira, Kota Baubau. Pelatihan dibuka Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Yuslina, SKM., M.Si., Senin (24/8/2026).

Yuslina mengatakan, kemampuan petugas laboratorium menjadi salah satu mata rantai penting dalam mempertahankan

eliminasi malaria. Setiap penderita malaria klinis yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan pemeriksaan untuk memastikan diagnosis melalui konfirmasi laboratorium secara mikroskopis. Fasilitas kesehatan yang belum memiliki kemampuan pemeriksaan mikroskopis dapat menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT). “Keberhasilan eliminasi ini harus terus kita pertahankan karena daerah yang telah mencapai status eliminasi tetap memiliki risiko terjadinya penularan kembali,” ujarnya.

Urgensi penguatan tersebut tergambar dari data SISMAL. Pada 2021 terdapat 5.628 tenaga ATLM yang tersebar di 4.426 fasilitas kesehatan pelapor, tetapi 4.122 di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan mikroskopis malaria. Dari 1.241 mikroskopis yang menjalani uji kompetensi, hanya 750 orang yang memenuhi syarat. Kondisi itu menunjukkan peningkatan keterampilan petugas perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penemuan kasus dapat berlangsung cepat dan akurat.

Konfirmasi laboratorium juga diperlukan untuk mencegah pemberian obat antimalaria tanpa kepastian diagnosis. Pemeriksaan yang tepat membantu memastikan penderita

memperoleh penanganan sesuai kondisi sekaligus mengurangi risiko penggunaan obat yang tidak tepat dan potensi munculnya resistensi. Karena itu, Yuslina meminta peserta tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi menerapkan keterampilan yang diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.

Secara historis, Indonesia telah menjalankan program pemberantasan malaria selama puluhan tahun. Upaya formal dimulai melalui Komando Operasi Pemberantasan Malaria (KOPEM) pada 12 November 1959. Program tersebut kemudian berkembang menjadi pengendalian malaria hingga kebijakan eliminasi. Pada 2009, pemerintah menetapkan kebijakan eliminasi malaria secara bertahap dengan target eliminasi nasional paling lambat 2030.

Kemajuan nasional terlihat dari meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi. Pada 2021, sebanyak 347 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 68 persen telah dinyatakan mencapai eliminasi. Setahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 372 kabupaten/kota atau 72,4 persen. Namun, lebih dari 90 persen kasus yang dilaporkan secara na-

sional pada periode tersebut masih berasal dari sejumlah wilayah endemis di Indonesia bagian timur.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030 menargetkan penurunan angka kejadian dan kematian akibat malaria sekurang-kurangnya 90 persen pada 2030. Indonesia sendiri menargetkan eliminasi malaria secara nasional pada tahun yang sama. Pengalaman global menunjukkan mempertahankan wilayah yang telah bebas malaria sama pentingnya dengan eliminasi penularan, sehingga pengawasan, diagnosis, dan respons terhadap kasus harus terus berjalan.

“Seluruh peserta diharapkan mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mengasah keterampilan pemeriksaan mikroskopis secara tepat dan berkualitas. Ilmu yang diperoleh hendaknya langsung diterapkan di fasyankes masing-masing demi mendukung penemuan kasus secara dini,” kata Yuslina. Bagi Baubau, penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga capaian eliminasi sekaligus mencegah malaria kembali menjadi persoalan kesehatan masyarakat.(*)

BPOM Pertahankan WTP ke-12, Akuntabilitas Keuangan Jadi Sorotan



Laporan: Ardi

JAKARTA, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara setelah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Opini tersebut diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2025 dan diserahkan di Kantor BPK, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi indikator konsistensi BPOM dalam memperkuat tata kelola, sistem pengendalian internal, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam kesempatan itu, Anggota VI BPK Fathan Subchi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar, didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi dan Sekretaris Utama BPOM Jayadi.

Fathan menyebut kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPOM tergolong sangat baik. Persentasenya mencapai 97,13 persen. Dari sembilan indikator BPOM yang mendukung prioritas nasional, sebanyak delapan indikator atau 88,89 persen bahkan berhasil mencapai target di atas 100 persen. Menurut dia, capaian tersebut memperlihatkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pemerintahan.

“Opini WTP merupakan cerminan komitmen BPOM dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui penguatan tata kelola, sistem pengendalian, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” ujar Fathan.

BPK juga mengingatkan BPOM agar tidak berhenti pada pencapaian opini WTP. Fathan menekankan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system untuk mencegah potensi persoalan dalam pengelolaan keuangan. BPK meminta seluruh tindak lanjut atas hasil pemeriksaan diselesaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya

memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,94. Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pembinaan dan pengawasan yang selama ini diberikan kepada BPOM. “Pencapaian opini WTP selama 12 kali berturut-turut ini menjadi indikator penting dalam evaluasi reformasi birokrasi di BPOM,” kata Taruna.

Rentetan prestasi tersebut berlangsung dalam perjalanan panjang kelembagaan BPOM. Secara historis, BPOM ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, kemudian kedudukan dan organisasinya diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Pada 2017, kelembagaan BPOM kembali diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.

Penguatan kapasitas BPOM juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2018 mencatat sistem regulasi Indonesia mencapai maturity level 3 dalam penilaian Global Benchmarking Tool. Selanjutnya, pada Desember 2025, WHO secara formal mengakui BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA), menempatkan Indonesia dalam jaringan otoritas regulator yang memenuhi standar internasional tinggi. Jaringan tersebut saat itu mencakup 41 otoritas dari 39 negara.

“Capaian ini juga memperkuat posisi BPOM yang sebelumnya telah meraih pengakuan internasional sebagai WHO-Listed Authority, sebuah pengakuan sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju,” jelas Taruna. Dalam kerangka WHO, status WLA diberikan kepada otoritas regulator dengan tingkat kematangan dan kinerja tinggi sehingga keputusan regulasinya dapat menjadi rujukan dalam konteks tertentu.

Penyerahan LHP kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan secara langsung dari BPK kepada BPOM. Kedua lembaga menyatakan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, transparansi, dan tata kelola keuangan negara. Bagi BPOM, WTP ke-12 bukan sekadar capaian administratif, melainkan pijakan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kapasitas pengawasan obat dan makanan di tengah tuntutan standar nasional dan internasional yang terus meningkat.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks	Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
---	---	---

Kasus Dokter Icha Bergulir, Tiga Anggota DPRD TTU Jadi Tersangka, Polda NTT Siapkan Pemanggilan



Momen keluarga mendiang dr Icha melapor ke Polda NTT terkait dugaan intimidasi oleh anggota DPRD Timor Tengah Utara.

Laporan: Amran

KUPANG, BP- Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) segera memanggil tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan intimidasi terhadap mendiang Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik gabungan menggelar perkara pada Senin (24/8/2026).

Ketiga anggota DPRD TTU yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Therenzius Lazakar dari Partai Golkar, anggota Komisi I; Norbertus Tubani dari PKB, Ketua Komisi III; serta Veronika Lake dari PDI Perjuangan, Sekretaris Komisi III. Ketiganya sebelumnya dilaporkan keluarga Dokter Icha terkait dugaan intimidasi saat korban menangani pasien di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Kabid Humas Polda NTT Kumbes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik kini menyelesaikan administrasi penyidikan sebelum melayangkan surat pemanggilan kepada ketiga tersangka. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

“Proses administrasi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam minggu ini. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan sesuai dengan tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Henry, Selasa (25/8/2026).

Menurut Henry, gelar perkara yang berlangsung sehari sebelumnya menjadi dasar penyidik menetapkan tiga anggota DPRD TTU sebagai tersangka. Setelah penetapan itu, penyidik melanjut-

jutkan proses pemberkasan perkara untuk menentukan tahapan hukum berikutnya.

“Iya, sudah dilakukan gelar perkara Senin kemarin terkait penetapan tersangka,” ujar Henry.

Pihak keluarga Dokter Icha menyatakan telah menerima pemberitahuan perkembangan penyidikan dari Polda NTT. Kuasa hukum keluarga, Viktor Manbait, mengatakan surat pemberitahuan bernomor B/516/VII/2026/Ditreskrimum itu menyebut tiga orang sebagai tersangka.

Viktor menjelaskan, berdasarkan pemberitahuan penyidik, ketiga anggota DPRD tersebut diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh berupa penganiayaan dan atau pengancaman dengan kekerasan verbal agar seseorang melakukan sesuatu. Dugaan perbuatan tersebut disebut keluarga berdampak terhadap kondisi psikologis Dokter Icha.

“Perbuatan itu diduga menyebabkan gangguan kesehatan berupa depresi berat yang kemudian berujung pada kematian karena bunuh diri,” kata Viktor.

Penyidik disebut menerapkan sejumlah ketentuan pidana dalam perkara tersebut, antara lain Pasal 466 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 huruf c, Pasal 58 huruf a, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik juga mencantumkan dugaan Pasal 530 mengenai pejabat yang melakukan penyiiksaan serta sejumlah ketentuan lain dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Para tersangka disebut terancam hukuman hingga tujuh tahun penjara.

Kasus ini bermula pada 13 Juni 2026 ketika Dokter Icha menangani pasien yang mengalami gigitan ular di UGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Dalam peristiwa tersebut, tiga anggota DPRD TTU diduga melakukan intimidasi terhadap dokter yang sedang memberikan pelayanan medis. Pasien yang digigit ular itu kemudian berhasil diselamatkan dan disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Sekitar dua pekan setelah kejadian, Dokter Icha ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pada Jumat (26/6/2026). Keluarga menyebut korban mengalami depresi berat dan gangguan psikologis setelah peristiwa intimidasi tersebut. Jenazah Dokter Icha dimakamkan pada Senin (29/6) dan prosesi pemakaman dihadiri ribuan pelayat.

Keluarga kemudian melaporkan dugaan intimidasi itu ke Polda NTT pada Jumat (3/7). Selain tiga anggota DPRD TTU, laporan tersebut juga mencantumkan seorang aparat sipil negara (ASN), Maria Mathildis Sau, yang merupakan dokter hewan dan bertugas di Dinas Peternakan TTU. Dengan demikian, terdapat empat orang yang semula dilaporkan dalam perkara tersebut.

Perkembangan perkara pidana itu juga berimbas pada posisi politik ketiga anggota DPRD TTU. Badan Kehormatan DPRD TTU menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap mereka pada 27 Juli

2026. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD TTU pada 29 Juli 2026.

Secara hukum, perkara ini memasuki babak baru setelah penetapan tersangka dilakukan pada 24 Agustus. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi salah satu dasar hukum penyidikan tersebut telah berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan sejumlah ketentuan pidana lama sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

Kasus Dokter Icha juga berlangsung dalam konteks persoalan kesehatan mental yang menjadi perhatian dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 727.000 orang meninggal akibat bunuh diri pada 2021. WHO menegaskan bahwa bunuh diri dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk kondisi psikologis, tekanan sosial, pengalaman kekerasan, kehilangan, konflik, dan situasi krisis.

Dalam konteks global, pencegahan bunuh diri telah menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO dan PBB menargetkan penurunan angka bunuh diri global sebesar sepertiga pada 2030. WHO juga menekankan pentingnya dukungan psikologis, identifikasi dini, serta peliputan media yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan bunuh diri.

Dengan penetapan tiga anggota DPRD TTU sebagai tersangka, penyidik Polda NTT kini memiliki tahapan lanjutan berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para tersangka. Polisi menyatakan seluruh proses akan dilakukan berdasarkan tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, keluarga Dokter Icha berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang rangkaiannya peristiwa yang mereka yakini berkaitan dengan kondisi psikologis korban sebelum meninggal dunia. (*)

Ruben Onsu Akan Diperiksa Jumat, Polisi Dalami Dugaan Penipuan Rp3,5 Miliar



Selebritas Ruben Onsu

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebritas Ruben Onsu sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan pada Jumat, 28 Agustus 2026. Pemeriksaan tersebut menjadi agenda lanjutan setelah penyidik menetapkan Ruben sebagai tersangka melalui gelar perkara.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengatakan surat panggilan pemeriksaan terhadap Ruben telah dijadwalkan untuk Jumat pekan ini. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kerja sama investasi antara Ruben dan korban berinisial DM.

“Kalau panggilan pemeriksaan tersangka, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026,” kata Iskandarsyah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/8).

Meski jadwal pemeriksaan telah ditetapkan, polisi belum memastikan apakah Ruben akan hadir memenuhi panggilan tersebut. Penyidik masih menunggu pelaksanaan agenda pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Perkara tersebut bermula ketika Ruben diduga menawarkan kepada DM untuk menanamkan modal dalam usaha jual beli sebuah produk. Tawaran itu kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerja sama investasi antara kedua pihak.

Dalam kerja sama tersebut, Ruben disebut menjanjikan keuntungan kepada korban. Namun, setelah melewati batas waktu yang disepakati, keuntungan sebagaimana dijanjikan tidak diterima oleh DM.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan, hubungan antara Ruben dan korban berawal dari penawaran usaha yang kemudian berkembang menjadi kerja sama investasi. Polisi kini mendalami seluruh rangkaian transaksi dan kesepakatan yang menjadi dasar laporan korban.

“Saya sampaikan kronologisnya, bahwa si terlapor (Ruben) itu mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya,” ujar Iskandarsyah.

Akibat persoalan tersebut, korban disebut mengalami kerugian sekitar Rp3,5 miliar. Nilai kerugian itu menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik dalam proses penyidikan perkara.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi sebelumnya mengatakan perkara tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 25 April 2026. Dalam proses itu, polisi telah memeriksa enam orang saksi, termasuk seorang ahli.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan, penyidik menggelar perkara untuk menentukan perkembangan status hukum terlapor. Berdasarkan hasil gelar perkara, peserta gelar menyepakati perubahan status

Ruben dari terlapor menjadi tersangka.

“Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka,” kata Joko Adi.

Penetapan tersangka tersebut membuat proses hukum memasuki tahapan pemeriksaan terhadap Ruben. Polisi selanjutnya akan menggali keterangan tersangka sekaligus mencocokkannya dengan keterangan korban, saksi, ahli, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan.

Di sisi lain, Ruben menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur damai. Ia juga disebut bersedia mengembalikan dana yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut. Sikap itu tidak serta-merta menghentikan proses hukum karena penyidik tetap menjalankan tahapan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus dugaan penipuan yang berkaitan dengan investasi tersebut juga menambah perhatian terhadap pentingnya kehati-hatian dalam aktivitas penanaman modal. Di Indonesia, pengaturan aktivitas pasar modal telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku sejak 10 November 1995.

Upaya pencegahan terhadap praktik investasi ilegal juga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, sejak 2017 hingga 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 13.228 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.811 entitas investasi ilegal.

Secara historis, persoalan penipuan berkedok investasi bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, praktik yang kemudian dikenal sebagai skema Ponzi mencuat pada 1920 ketika Charles Ponzi menawarkan keuntungan besar melalui investasi surat kupon pos internasional. Skema tersebut akhirnya runtuh setelah penyelidikan dilakukan, dan kasus itu kemudian menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah penipuan investasi dunia.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa iming-iming keuntungan dapat menjadi daya tarik dalam berbagai bentuk penipuan finansial, baik pada era investasi konvensional maupun ketika transaksi telah berkembang melalui sistem digital. Karena itu, transparansi perjanjian, kejelasan usaha, legalitas kegiatan, serta mekanisme pengembalian dana menjadi aspek penting sebelum seseorang menanamkan modal.

Untuk perkara Ruben Onsu, polisi masih harus menyelesaikan rangkaian penyidikan guna menentukan konstruksi perkara berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Pemeriksaan terhadap Ruben pada Jumat, 28 Agustus 2026, menjadi salah satu tahapan penting untuk mengungkap secara lebih rinci dugaan penipuan dan penggelapan yang menyebabkan korban mengaku mengalami kerugian Rp3,5 miliar. (*)

Goraana Oputa di Kota Baubau Tandai Awal Maulid Nabi, Tradisi Islam Wolio Tetap Terjaga



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menjadikan pelaksanaan Goraana Oputa di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau sebagai momentum memperkuat hubungan antara ulama, umara, dan masyarakat. Ritual yang digelar pada Selasa (25/08/2026) dini hari tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam tradisi masyarakat Wolio.

Goraana Oputa dilaksanakan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, yang dalam prosesi tersebut berkedudukan sebagai Sulewatana atau pengganti Oputa. Prosesi berlangsung di ruang utama Rujab Wali Kota Baubau dengan diikuti perangkat Masjid Agung Keraton dan unsur Forkopimda laki-laki, sedangkan undangan perempuan mengikuti kegiatan dari ruang tengah.

Tradisi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial keagamaan. Bagi masyarakat Wolio, Goraana Oputa merupakan bagian dari warisan Kesultanan Buton yang memadukan nilai keislaman, kepemimpinan, kebersamaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap keselamatan rakyat serta negeri.

Dalam pelaksanaannya, pembacaan Barzanji dilakukan Sara Kidina yang terdiri atas Imam bersama empat orang Moji. Bacaan tersebut memuat doa-doa serta kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dalam prosesi Goraana Oputa.

Setelah pembacaan Barzanji selesai, rangkaian ritual dilanjutkan dengan makan bersama. Prosesi tersebut memperlihatkan pertautan antara nilai keagamaan dan semangat kebersamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan

sosial masyarakat Wolio sejak masa Kesultanan Buton.

Yusran mengatakan, pelaksanaan Goraana Oputa di Rujab Wali Kota Baubau harus dimaknai sebagai ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Menurut dia, tradisi tersebut memiliki pesan yang lebih luas daripada sekadar memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

“Goraana Oputa menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara ulama, umara, dan masyarakat,” kata Yusran.

Ia menilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut mengandung pesan kepemimpinan, persaudaraan, kebersamaan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, tradisi penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW di Tanah Wolio berkembang seiring masuk dan menguatnya Islam di wilayah Buton. Sejarah lokal mencatat Islam telah masuk dan berkembang di Tanah Wolio sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Sejak saat itu, ajaran Islam menjadi salah satu landasan penting dalam kehidupan masyarakat Wolio dan kemudian berpadu dengan tata kehidupan kesultanan.

Tradisi Maulid sendiri memiliki sejarah panjang dalam perkembangan peradaban Islam. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW berkembang dalam berbagai bentuk di sejumlah wilayah dunia Islam dan memiliki corak yang berbeda-beda. Tradisi pembacaan riwayat kehidupan Nabi, doa, serta pemberian makan kepada masyarakat kemudian menjadi bagian dari praktik Maulid di banyak komunitas Muslim.

Di Indonesia, peringatan Maulid Nabi

juga berkembang menjadi tradisi sosial dan budaya yang beragam. Di sejumlah daerah, kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan Barzanji, pengajian, doa bersama, kenduri, hingga berbagai bentuk sedekah. Keragaman tersebut menunjukkan bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan kebudayaan lokal tanpa menghilangkan substansi penghormatan kepada Rasulullah SAW.

Di Tanah Wolio, penghormatan tersebut diwujudkan melalui rangkaian tradisi yang berlangsung selama Rabiul Awal. Masyarakat Wolio menyebut bulan tersebut sebagai Bula Kasongoana Nabi, yakni bulan yang dikhususkan untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, masyarakat tidak melaksanakan upacara adat lainnya pada bulan tersebut dan memusatkan perhatian pada rangkaian Maulid.

Rangkaian tersebut berlangsung selama 18 hari, mulai tanggal 12 hingga 30 Rabiul Awal, dengan tiga tahapan utama, yakni Goraana Oputa, Haroana Miya Bari, dan Maludhuna Hukumu. Ketiganya memiliki fungsi dan waktu pelaksanaan yang berbeda dalam tradisi Maulid masyarakat Wolio.

Goraana Oputa menjadi tahap awal yang dimulai pada pukul 00.00 dini hari tanggal 12 Rabiul Awal. Ritual tersebut merupakan bentuk munajat pemimpin kepada Allah SWT untuk memohon keselamatan negeri dan seluruh rakyat sekaligus mempertemukan unsur umara dengan ulama yang diwakili perangkat Masjid Agung Keraton.

Tahap berikutnya adalah Haroana Miya Bari yang dilaksanakan pada pagi hari setelah Goraana Oputa. Pada tahap ini, masyarakat Wolio secara luas mendapat kesempatan melaksanakan haro atau peringatan Maulid Nabi hingga tanggal

29 Rabiul Awal. Rangkaian tersebut menjadi ruang kebersamaan masyarakat dalam mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Adapun Maludhuna Hukumu menjadi tahapan terakhir sekaligus penutup rangkaian Maulid di Tanah Wolio. Ritual tersebut dilaksanakan pada 30 Rabiul Awal oleh seluruh perangkat Masjid Agung Keraton dan bertempat di Galampa Lakina Agama.

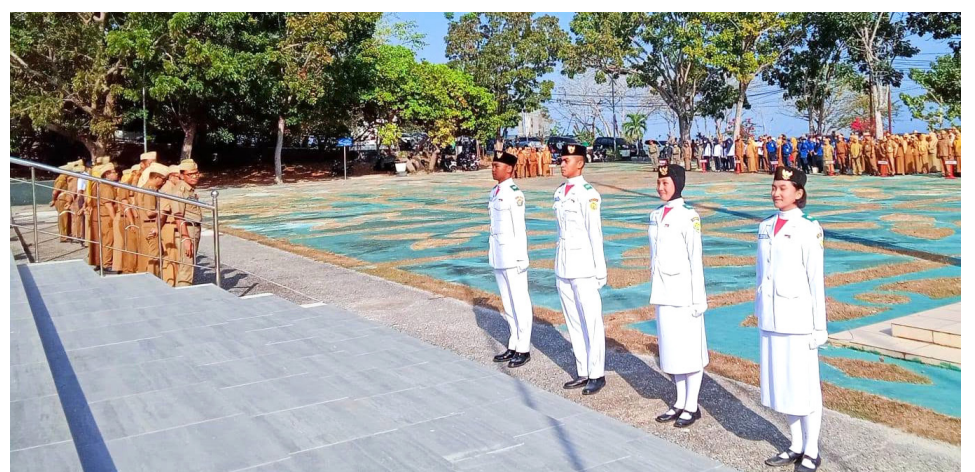
Tradisi Goraana Oputa juga memiliki jejak kuat dari masa Kesultanan Buton. Pada masa kesultanan, prosesi tersebut dilaksanakan di Istana Sultan. Pembacaan Barzanji dilakukan Bhis Patamiana, sementara Sultan dan permaisuri berada di tempat terpisah yang dibatasi tirai atau kelambu. Setelah pembacaan selesai, Sultan dan permaisuri kemudian bergabung dengan perangkat kesultanan.

Menurut Yusran, keberlangsungan tradisi tersebut penting bagi generasi masa kini karena Goraana Oputa bukan hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Baubau dan Tanah Wolio.

“Pemerintah Kota Baubau berkomitmen menjaga, melestarikan, dan meningkatkan nilai-nilai religi serta kearifan lokal masyarakat Wolio,” ujarnya.

Pelaksanaan Goraana Oputa di Rujab Wali Kota Baubau dengan demikian tidak hanya menandai dimulainya rangkaian Maulid Nabi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara warisan sejarah Kesultanan Buton dan kehidupan pemerintahan modern. Tradisi tersebut diharapkan tetap hidup sebagai bagian dari identitas masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan tanggung jawab bersama dalam membangun Kota Baubau. (*)

Siswa SMAN 2 Baubau Reyhan Tembus Paskibraka Nasional, Pemkot Apresiasi Pelajar Berprestasi dan 77 Paskibraka Baubau Dapat Pembinaan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memberikan apresiasi kepada panitia, aparat sipil negara (ASN), serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyekeskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Apresiasi serupa diberikan kepada pelajar Baubau yang mencatat prestasi di tingkat Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Kota Baubau, Senin (24/08/2026). Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda HUT RI tidak terlepas dari koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat, mulai dari lomba Gerak Jalan Indah (GJI), olahraga, kebersihan lingkungan dan kantor, hingga kegiatan lainnya.

“Pemerintah Kota Baubau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia serta ASN yang telah bekerja keras sehingga seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik,” ujar La Ode Darus Salam.

Di sisi lain, Pem-

kot Baubau menaruh perhatian khusus terhadap capaian generasi muda. La Ode Reyhan Putra Satria Korwa, siswa SMA Negeri 2 Baubau, berhasil terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2026 yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pelajar daerah mampu berkompetisi hingga tingkat nasional.

“Ini tentu menjadi kebanggaan kita semua. Anak-anak kita telah menunjukkan bahwa putra-putri Kota Baubau mampu bersaing dan berprestasi hingga ke tingkat nasional,” katanya.

Selain Reyhan, tiga pelajar Baubau mendapat kepercayaan bertugas dalam upacara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Siswa SMAN 4 Baubau bertugas sebagai pembawa baki saat penaikan bendera, sedangkan perwakilan SMAN 1 Baubau dan SMAN 7 Baubau menjalankan tugas sebagai pembentang dan pasukan pengibar bendera. Di tingkat Kota Baubau, sebanyak 77 anggota Paskibraka juga memperoleh apresiasi melalui program pembinaan selama dua hari di Villa Nirwana.

Pembinaan bagi 77 anggota Paskibraka tersebut diharapkan tidak sekadar sebagai penghargaan atas pengabdian mereka selama pelaksanaan upacara, tetapi juga untuk memperkuat karakter, kedisiplinan,

kebersamaan, dan wawasan kebangsaan. Secara historis, pengibaran Bendera Pusaka pertama kali dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sejak saat itu, tradisi pengibaran Merah Putih menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan tradisi tersebut terus berlangsung hingga kini. Pada 2024, untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT RI digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara pada HUT ke-81 tahun 2026 Paskibraka Nasional kembali menjadi representasi generasi muda dari berbagai daerah. Karena itu, Pemkot Baubau berharap prestasi para pelajar tersebut dapat menumbuhkan motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama daerah.

“Prestasi ini harus kita jadikan motivasi bersama. Pemerintah tentu akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap anak-anak kita yang berprestasi,” kata La Ode Darus Salam. Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan ASN dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño, antara lain dengan tidak membakar sampah sembarangan dan mengawasi aktivitas anak-anak yang bermain api. (*)